BAB II

KERJASAMA INTERNASIONAL TERKAIT *ASSET*

***RECOVERY* HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI**

INDONESIA BERDASARKAN UNCAC 2003

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional

Untuk mengadakan hubungan antar negara yang bersifat internasional haruslah dibutuhkan pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Suatu Peraturan yang dibentuk oleh masyarakat dunia untuk mengatur mengenai interaksi yang terjadi agar terciptanya ketertiban dunia dalam menjalankan hubungan tersebut dikenal dengan hukum internasional. Hukum internasional digunakan dalam hubungan kerjasama internasional yang dilakukan baik bersifat bilateral, multilateral, maupun regional. Semua negara memiliki kewajiban untuk mematuhi tata cara dan pedoman yang sudah disepakati oleh negara-negara dalam organisasi PBB.

1. Pengertian Hukum Internasional

Pengertian yang umum digunakan untuk mendeskripsikan hukum internasional adalah suatu himpunan dari ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar negara-negara serta subjek hukum internasional lainnya dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia. Setelah abad ke-20 dimana ilmu pengetahuan dan teknologi

berkembang pesat mendorong peningkatan hubungan atau kerjasama antar negara, munculnya negara-negara baru dan organisasi internasional yang mengakibatkan semakin meluasnya ruang lingkup hukum internasional. Yang sebelumnya hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional, selanjutnya organisasi internasional, kelompok pembebasan nasional, kelompok supranasional dan pada hal tertentu individu dapat menjadi subjek dalam hukum internasional.³²

Menurut pendapat Akehurt, ia mengatakan bahwa hukum “internasional merupakan sistem yang terbentuk atas hubungan yang dilakukan oleh negara-negara”. Selain itu, pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Charles Cheny Hyde yang menyebut bahwa: “hukum internasional dapat diartikan sebagai sekelompok hukum yang sebagian besar adalah peraturan-peraturan dan asas-asas yang wajib dipatuhi oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga wajib ditaati dalam hubungan-hubungan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, serta termasuk didalamnya adalah organisasi internasional, individu dan subjek hukum bukan negara (*non-state entities*) selama hak dan kewajiban atas individu dan subjek hukum *non-state entities* tersebut memiliki kaitan dengan sengketa masyarakat internasional”.³³

Istilah paling populer saat ini yang ditujukan kepada suatu hukum yang melibatkan negara-negara di dunia adalah Hukum publik internasional

---

³² Mauna.

³³ Hasim.

(*public international law*) atau Hukum internasional (*international law*). Istilah ini menggantikan istilah Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*) dan Hukum antar negara (*inter state law*) yang saat ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Istilah lain yang sering digunakan adalah hukum transnasional (*transnational law*), istilah ini berkembang oleh para pakar karena ketidaksetujuan atas pembagian hukum internasional publik dan hukum internasional karena menurut mereka sulit untuk memberikan batasan yang jelas antara hukum dengan karakteristik publik dan perdata.³⁴

Diluar itu, salah satu tokoh hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi “hukum internasional merupakan keseluruhan asa- asas, norma-norma, dan kaidah-kaidan hukum yang memberikan pengaturan tentang dalam hubungan lintas batas negara, negara dengan negara, serta negara terhadap subjek hukum bukan negara ataupun antara subjek hukum bukan negara.”³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kita bisa menggambarkan secara umum terhadap substansi dan ruang lingkup yang dimiliki oleh hukum internasional, yang mana berisikan unsur subjek, hubungan hukum yang lahir antar subjek, dan juga hal lain terkait pengaturan serta prinsip-prinsip hukum internasional.

---

³⁴ Sefriani.,Op. Cit., 3

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

2. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Pengelompokan terhadap sumber hukum internasional dapat dibedakan atas dua kelompok utama, yaitu pengelompokan hukum internasional berdasarkan pasal 38 (1) Statuta MI (Statuta Mahkamah internasional) dan juga berdasarkan pendapat dari para sarjana hukum internasional. Menurut pendapat para sarjana, sumber hukum internasional terdiri daripada : kebiasaan, keputusan pengadilan/ badan arbitrase. Traktat, karya hukum, dan ketetapan dari organ atau lembaga internasional.

Sedangkan dalam pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (MI), sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi empat instrumen, yaitu : Perjanjian internasional (*international convention*), terdiri dari perjanjian yang bersifat khusus maupun umum, kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*), dan putusan pengadilan (*judicial decisions*).³⁶

Penjelasan mengenai sumber hukum internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional, sebagai berikut :

a. Perjanjian Internasional (*international conventions*)

Secara umum, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang terdiri dari dua atau lebih subjek hukum internasional terkait suatu objek permasalahan tertentu yang

---

³⁶ Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*, ed. oleh Susilo (Loka Aksara, 2019).

dimaksudkan untuk membangun hubungan hukum atau dengan kata lain menimbulkan hak dan kewajiban dengan hukum internasional sebagai landasan pengaturannya.³⁷ Namun definisi tersebut masihlah sangat luas karena tidak menyebutkan secara khusus subjek hukum internasional mana saja yang dapat mengadakan perjanjian internasional. Dalam kenyataannya adalah hanya negara, organisasi internasional (OI), tahta suci, organisasi pembebasan, dan kaum belligerensi yang dapat berkedudukan didalam suatu perjanjian internasional. Selain itu juga, pengertian diatas tidak menjelaskan tentang perbedaan antara perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis yang mana kedua perjanjian tersebut memiliki kharakter yang berbeda.

Pasal 1 butir 1 dari UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberikan artian bahwa perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian, yang disusun dalam nama dan bentuk tertentu, yang diatur didalam hukum internasional yang dibuat dalam bentuk tertulis sekaligus melahirkan hak dan kewajiban pada bidang hukum publik.³⁸

b. Kebiasaan Internasional (*international custom*)

Pada mulanya, kebiasaan internasional memegang peran penting sebagai sumber hukum internasional, namun seiring berjalanya waktu dan perubahan zaman, makna daripada kebiasaan internasional menjadi

---

³⁷ Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*.

³⁸ Pasal 1 butir 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

kecil selaras dengan banyaknya perjanjian internasional yang menciptakan hukum (*law making treaties*). Meskipun demikian hukum kebiasaan internasional masih memiliki substansinya, dikarenakan pada saat ini sebagian besar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yurisdiksi negara, wilayah negara serta hubungan diplomatik tetap diatur melalui hukum kebiasaan internasional.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa “kebiasaan internasional adalah kebiasaan umum yang dapat diterima sebagai hukum”.³⁹ lebih lanjut, disebutkan bahwa, kebiasaan internasional lahir atas dua faktor, yaitu :

- 1) Bahwa harus adanya suatu kebiasaan yang telah dilakukan dan dipatuhi oleh banyak negara di dunia,
- 2) Bahwa kebiasaan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai kewajiban hukum.

Unsur pertama menurut Mochtar dinyatakan sebagai “unsur material” sedangkan unsur kedua disebut sebagai “unsur *psycologis*”.

c. Prinsip Hukum Umum Yang Telah Diakui Oleh Negara Beradab

Prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab diperkenalkan pertama kali oleh Statuta PCIJ yang memiliki tujuan agar terhindar dari masalah *non liquet* atas suatu kasus yang dihadapkan

---

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional : buku I* (Bandung, West Java: Bina Cipta, 1982).

kepada hakim. Hakim tidak memiliki hak untuk menolak suatu perkara yang ditujukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum belum mengakomodir perkara tersebut. Prinsip ini diarahkan apabila hakim tidak menemukan perjanjian ataupun kebiasaan yang memiliki relasi terhadap kasus yang sedang dihadapinya.

Prinsip hukum umum (*general principles*) adalah prinsip-prinsip hukum yang dikenal secara umum bukan terbatas hanya pada hukum internasional semata, misalnya prinsip yang digunakan didalam hukum pidana, hukum acara dan lain sebagainya yang diterima dalam praktik didalam negara-negara. Beberapa diantara prinsip tersebut adalah prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip *res judicata*, prinsip itikad baik (*good faith*), *nullum delictum nulla poena legemali*, *rekroaktif*, *nebis in idem*, dan sebagainya.

d. Putusan pengadilan (*Judicial Decisions*)

Putusan pengadilan yang termasuk bagian dari sumber hukum internasional seperti yang disebut dalam pasal 38 Statuta MI merupakan sumber hukum *subsidiary* atau sumber hukum tambahan daripada sumber hukum internasional lainnya. Walaupun begitu, kedudukan dari putusan pengadilan baik putusan pengadilan internasional ataupun pengadilan nasional, tidak berarti bahwa putusan pengadilan tersebut memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada sumber hukum internasional lainnya.⁴⁰

---

⁴⁰ Sefriani., Op. Cit., 48-49

3. Subjek Hukum Internasional

Setelah mengetahui apa pengertian dari hukum internasional dan bagaimana ruang lingkup dari hukum internasional, Hal yang paling utama lainnya dalam proses pembentukan dan penegakan dari hukum internasional adalah subjek hukum atau aktor hukum internasional. Terdapat beberapa subjek hukum internasional, antara lain :

a. Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kewenangan yang besar dan penting. Sebagai suatu entitas, Negara menyanggah hak serta kewajiban dalam ruang lingkup internasional. Pada pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara menyebutkan beberapa karakteristik dari negara, yaitu :

- 1) Mempunyai *a defined territory*
- 2) Memiliki *a permanent population*
- 3) Memiliki pemerintahan
- 4) Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).

Kemampuan suatu negara untuk melakukan hubungan internasional dalam kajian hukum nasional dan internasional merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut R.C.Hingorani, kemampuan untuk melaksanakan suatu hubungan internasional bagi suatu negara adalah sebuah keharusan agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat internasional serta menjadi subjek hukum internasional.⁴¹

b. Organisasi Internasional

Organisasi publik internasional *atau public internasional organization* adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dengan berdasarkan perjanjian internasional. Organisasi internasional sekaligus organ-organ merujuk pada “*advisory of opinion international Court of Justice*” tentang status Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diakui sebagai subjek dari hukum internasional. Dalam praktiknya saat ini, banyak organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan konvensi internasional tentang fungsi dan kewajiban organisasi internasional.⁴²

c. *Internasional Non Government Organization (INGO)*

---

⁴¹ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, I (Bandung: Nusa Media, 2019).

⁴² P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu (Graha Ilmu, 2011).

Peran INGO atau di Indonesia lebih dikenal dengan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) yang sebelumnya lebih banyak mengambil bagian sebagai oposisi dari pemerintah, saat ini ikut serta menjadi mitra kerjasama pemerintah dalam pembangunan di banyak lini. INGO dianggap bisa menyampaikan kehendak pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjangkau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat.

Pengertian INGO yang paling sering digunakan saat ini adalah definisi INGO dari rumusan yang dilakukan oleh PBB, yaitu:

“those private organizations which commonly gain financial support from international agencies and which devote themselves to the design, study and execution of program and projects in developing countries”.

Salah satu contoh kuatnya keterlibatan INGO pada konstelasi hubungan internasional dapat terlihat disidang-sidang PBB. Yang mana INGO dalam *Committee on Non-Governmental Organizations* pada UNESCO dan ECOSOC berkedudukan sebagai *consultative states*.

d. Individu (*Natural Person*)

Individu secara tidak langsung menjadi subjek hukum internasional, dimana hubungan antara hukum internasional dan individu dilakukan melalui negara asal individu tersebut. Setelah perjanjian perang dunia pertama, individu diberikan hak untuk mengajukan tuntutan dalam perkara internasional. Selain itu, dalam

pengadilan ad hoc Tokyo dan Nurenberg menyatakan bahwa Individu memiliki *internasional personality*, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan hak dan kewajiban internasional yang diberikan kepadanya.

e. Perusahaan Transnasional

Menurut Norbert Horn yang memberikan definisi terkait Perusahaan transnasional, ia menyebut bahwa perusahaan transnasional adalah perusahaan yang terdiri dari perusahaan yang dikendalikan dari negara asalnya (*home country*) serta melakukan kegiatan ekonomi dan perusahaan yang berada di negara lain, yang mana negara tersebut menerima modal dari perusahaan (*host countries*).⁴³

f. ICRC (*International Commite on Te Red Cross*)

ICRC atau lebih dikenal dengan sebutan Palang Merah Internasional adalah organisasi internasional yang anggota didalamnya terdiri dari palang merah negara-negara di dunia dengan kantor pusat di Swiss. ICRC merupakan organisasi independen yang bertujuan untuk membantu korban konflik bersenjata dan memastikan perlindungan terhadap kemanusiaan

---

⁴³ Marcel Hendrapati dan Marthen Arie, "Perusahaan Transnasional dan Implikasinya dalam Hukum Nasional Indonesia," *law*, 3, 1995, 81
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v2i1.5141>>.

sekaligus memprosmosikan penghormatan atas hukum internasional daan penerapannya dalam hukum nasional.⁴⁴

g. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang Memperjuangkan Haknya
(*National Liberation Organization/ Representative Organization*)

Bangsa yang berjuang untuk mempertahankan hak yang dimilikinya adalah suatu bangsa yang melakukan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari negara asing yang menduduki serta menjajaah negara tersebut. Walaupun terdapat banyak organisasi yang menamakan diri sebagai organisasi pembebasan,namun tidak semuanya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari subjek hukum internasional. Selama ini pertimbangan faktor politik lah yang lebih dominan digunakan oleh masyarakat internasional, Yaitu terkait cita-cita, tujuan, dan keberadaan organisasi tersebut sangat menentukan dukungan dari dunia internasional.⁴⁵

h. *Belligerent*

Secara umum *belligerent* atau kelompok pemberontakan adalah suatu gerakan untuk menentang kekuasaan suatu pemerintahan negara yang sah. Dalam pengertian lainnya, *Belligerent* dapat diartikan sebagai

---

⁴⁴ International Committee of the Red Cross, "The ICRC's mandate and mission," *Icrc*, 2021 <<https://www.icrc.org/eng/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm>> [diakses 27 Januari 2021].

⁴⁵ Sefriani.,Op. Cit., 149.

penolakan atas suatu otoritas negara yang sah. Penggunaan istilah pemberontak dalam forum dunia sangat beragam, mulai dari ‘*subversive group*’ (kelompok subversif), ‘*armed civilian groups*’ (gerombolan kelompok sipil bersenjata), ‘*non state entities*’ (kesatuan non negara), *guerillas* (pasukan bergerilya), dan terakhir ‘*rebels*’ yang memiliki gradasi lebih rendah atau *insecurtion* dengan gradasi lebih tinggi (pemberontak).⁴⁶

Di Indonesia sendiri ada beberapa istilah untuk menyebut kelompok belligerent, antara lain : gerakan pengacau keamanan (GPK), pemberontak, pembelok, teroris dan lain sebagainya.

4. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum internasional merupakan bagian dari tatanan hukum yang mengatur tentang segala aktivitas internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Sedangkan hukum nasional merupakan kesatuan dari norma-norma hukum yang teratur, yang terdiri dari berbagai sub sistem (misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan seterusnya).⁴⁷ Hukum nasional Indonesia yang saat ini digunakan merupakan gabungan dari sistem adat, hukum agama dan hukum pidana. Secara umum, sistem yang dianut dalam hukum perdata dan pidana adalah hukum Eropa

---

⁴⁶ Miftahus Sholehudin, “ISIS, pemberontak, dan teroris dalam hukum internasional,” *research repository universitas negeri Maulana Malik Ibrahim*, 10 (2015), 2.

⁴⁷ Atmadja, “Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional,” *Hukum dan Pembangunan*, 1, 2017, 433.

kontinental terutama Belanda karena didasari oleh sejarah pendudukan pada masa lalu.

Untuk melihat hubungan yang terdapat antara hukum internasional dan hukum nasional maka kita akan merujuk kepada dua teori utama yang terkenal, yaitu teori monisme dan teori dualisme.

a. Teori Monisme

Teori monisme muncul atas pemikiran bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mengatur kehidupan manusia. Segala hukum adalah kesatuan yang didalamnya berisi aturan-aturan yang mengikat, baik itu kepada individu, negara, maupun subjek hukum diluar dari negara. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan adanya suatu hubungan secara “hierarki” antara keduanya.

1) Monisme primat hukum internasional

Menurut aliran ini, hukum internasional menjadi sumber dari hukum nasional yang pada dasarnya kedudukan hukum nasional lebih rendah daripada hukum internasional, oleh karena itu hukum nasional harus tunduk kepada hukum internasional yang dianggap lebih unggul daripada hukum nasional dengan dua dasar utama, yaitu : pertama, dalam konperensi London tahun 1981 sudah mengakui hukum internasional tidak memiliki ketergantungan kepada pengapusan atau perubahan konstitusi suatu negara, konperensi ini menetapkan ketentuan dasar secara tegas bahwa

“perjanjian tidak akan kehilangan kekuatannya walaupun terjadi perubahan konstitusi dalam negeri”.

Kedua, telah diakui bahwa hukum internasional juga berlaku bagi negara baru yang diakui dalam masyarakat internasional meskipun tidak ada persetujuan sebelumnya. Meskipun adanya persetujuan, hal itu merupakan pernyataan terhadap kedudukan hukum yang telah ada. Selain itu, negara-negara di dunia juga berkewajiban untuk menselaraskan konstitusi dan hukum negaranya terhadap hukum internasional.

2) Monisme primat hukum nasional

Berlainan dengan aliran monisme primat hukum internasional, aliran ini berpendapat bahwa hukum internasional tidak lebih utama kedudukannya daripada hukum nasional dan pada dasarnya hukum internasional bersumber dari hukum nasional, alasan yang mendukung aliran ini adalah : *pertama*, tidak terdapat satupun organisasi internasional yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia dan kedudukannya lebih tinggi dari negara tersebut. *Kedua*, hukum internasional didasari oleh kewenangan negara-negara untuk melakukan suatu perjanjian internasional (kewenangan konstitusionil).⁴⁸

b. Teori Dualisme

---

⁴⁸ Melda Kamil Ariadno, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional,” jurnal Hukum Internasional, 2008, 510–511.

Teori ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional bukan merupakan satu kesatuan, melainkan dua hal yang berbeda satu dengan yang lain. Teori ini didukung oleh Anzilotti (1928) dan Triepel (1899) yang mengajarkan tentang teori pluralistik dan dualisme. Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum adalah dua sistem hukum yang tidak memiliki kesamaan sama sekali secara intrinsik.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu perbedaan subjek hukum, kekuatan hukum, dan sumber hukum. Dari segi subjek hukumnya, subjek hukum internasional merupakan negara-negara yang berada dalam masyarakat internasional, sedangkan subjek hukum nasional berupa individu-individu yang berada di dalam negara tersebut. Terkait sumber hukum yang digunakan, sumber hukum internasional bersumber pada kehendak bersama masyarakat internasional yang merupakan representasi dari banyak negara. Sedangkan hukum nasional memiliki sumber hukum yang berasal dari kehendak negara itu sendiri. Selain itu, dalam hal kekuatan hukumnya, hukum internasional lebih bersifat mengatur hubungan secara horizontal antar negara-negara, sedangkan hukum nasional lebih memiliki kekuasaan yang mengikat.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, Anzilotti dengan pendekatan yang berbeda menyebutkan bahwa hal mendasar yang membedakan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat

pada hakikat dari hukum internasional yang harus dijunjung tinggi, sebagai sebuah manifestasi dari kesepakatan bersama, sedangkan hukum nasional harus ditaati.⁴⁹

c. Aliran Hukum Campuran

Aliran ini merupakan aliran yang berbeda daripada kedua aliran sebelumnya, aliran hukum campuran terdiri dari 3 (tiga) teori, yaitu : teori transformasi, harmonisasi, dan delegasi. Ketiga teori tersebut tidak bertujuan untuk mencari perbedaan melainkan kedudukan hukum nasional dan internasional disebut sebagai alat penunjang satu sama lainnya.

5. Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Dalam Hukum Internasional

Prinsip atau asas-asas hukum pidana internasional secara umum dapat dibedakan dari sumbernya, yaitu asas hukum pidana internasional umum dan asas hukum pidana internasional khusus. Salah satu diantaranya adalah asas *pacta sunt servanda*, asas ini memiliki arti bahwa perjanjian itu mengikat bagi para pihak-pihak yang membuat perjanjian, asas ini merupakan salah satu yang paling utama dan tertua. Selain itu ada asas itikad baik (*good faith*).⁵⁰

---

⁴⁹ Variena Rehatta J.B, "Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran," *SASI*, 22.1 (2016), 56
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>>.

⁵⁰ Eddy Omar Sharif Hiarij, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31.1 (2019), 121
<<https://doi.org/10.22146/jmh.43968>>.

Prinsip-prinsip yurisdiksi didalam hukum internasional, antara lain terdiri dari:

a. Prinsip Teritorial

Dilihat dari sudut pandang hukum internasional, negara mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang memiliki dua sisi, baik internal maupun eksternal. Sisi internal atas kedaulatan suatu negara memunculkan kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*), sedangkan pada sisi eksternalnya, berkaitan dengan hubungan internasional dimana negara-negara saling hidup berdampingan melahirkan kesetaraan derajat, hak-hak dan juga kewajiban secara timbal balik antar negara dan kemampuan untuk menjalin hubungan pada kedudukan yang sama antara satu sama lain.

Kedaulatan teritorial secara tidak langsung melahirkan yurisdiksi teritorial yang mempunyai artian bahwa kewenangan, hak, ataupun kekuasaan untuk mengatur segala hal yang terdapat atau terjadi pada batas-batas wilayah suatu negara berdasarkan hukum internasional. Salah satu contoh implemementasi dari yurisdiksi teritorial adalah suatu negara dapat menciptakan dan melaksanakan hukum nasional di wilayahnya, termasuk didalamnya hukum pidana nasional atas batas teritorial wilayah negaranya kepada semua orang (baik warga negara maupun warga asing) atas suatu peristiwa hukum yang diperbuat, termasuk didalamnya terkait peristiwa pidana.

Prinsip teritorial juga menjadi salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 KUHP yang menyebut: “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia”.

Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh warga negara Indonesia dan memiliki akibat pada wilayah Indonesia, dimana tidak ada unsur asing didalamnya, maka dari sudut pandang hukum internasional sudah jelas merupakan yurisdiksi teritorial daripada Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, bahwa juga sudah jelas terlihat bahwa asas teritorial yang berlaku.

b. Prinsip Nasionalitas Aktif

Didalam ruang lingkup hukum internasional, suatu negara mempunyai yurisdiksi yang dikenal dengan yurisdiksi personal atas warga negaranya yang berkedudukan di luar negeri dengan dasar kewarganegaraan (nasional) aktif. Prinsip nasional aktif dilandasi oleh hubungan yang terjadi antara suatu negara dengan warga nya yang berkedudukan di luar negeri. Hubungan ini diwujudkan dalam bentuk kekuasaan, hak, dan kewenangan yang dimiliki negara untuk menegakan hukum nasionalnya kepada warga dari negara tersebut yang berkedudukan di luar negeri. Disisi lain, warga negara tersebut mempunyai hak-hak sekaligus menanggung kewajiban dalam hubungan

terhadap negaranya sepanjang dia masih berada di luar negeri. Salah satu dari kewajiban tersebut adalah keharusan untuk tunduk kepada hukum nasional negara asalnya.

c. Prinsip Nasionalitas Pasif

Berdasarkan prinsip ini, suatu negara mempunyai yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi warga ataupun negaranya baik yang dilakukan di dalam wilayah negara tersebut maupun yang berada di luar teritorialnya.⁵¹

Selanjutnya dikenal dengan nama yurisdiksi personal yang didasari atas prinsip kewarganegaraan pasif. Pengakuan atas prinsip ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di suatu negara maupun yang berada diluar wilayah negara tersebut. Prinsip ini juga dikenal dengan yurisdiksi personal yang didasari atas *protective principle*.

d. Prinsip Universal

Menurut prinsip universal, bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi terhadap orang yang melakukan kejahatan, pada wilayah negara manapun dan kapanpun terjadinya suatu kejahatan tersebut

---

⁵¹ | Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, I (Bandung: Yrama Widya, 2013). Op.Cit., 14

dilakukan, siapapun yang menjadi pelaku atau korban dari kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan yang dapat diadili dengan prinsip ini adalah kejahatan yang digolongkan sebagai musuh oleh umat manusia, seperti, terorisme, pembajakan udara, kejahatan narkoba, genosida, dan lain sebagainya. .⁵²

e. Prinsip Perlindungan

Prinsip ini mengemukakan bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas orang yang bukan warga negaranya yang telah berbuat kejahatan yang sangat mengancam kepentingan sendi-sendi utama negara, integritas, keamanan dan kedaulatan, dan juga berdampak kepada ekonomi negara. Kejahatan yang dapat dikategorikan yurisdiksi perlindungan, contohnya seperti : kejahatan *spying* (mata-mata), kejahatan keimigrasian dan ekonomi, dan lain sebagainya.⁵³

B. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama Internasional

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kerjasama internasional terkait *aset recovery* dalam UNCAC 2003 maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui ketentuan terkait kerjasama internasional yang diatur dalam ketentuan hukum internasional secara umum, antara lain :

---

⁵² Ibid., hal.15

⁵³ Dian Khoreanita Pratiwi, "Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perompakan Dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal Era Hukum*, 2.2 (2017), 7.

1. Pengertian Kerjasama Internasional

Kerjasama interanasional memiliki arti sebagai suatu bentuk hubungan yang dilaksanakan oleh suatu negara kepada negara lain dengan tujuan untuk dapat memenuhi dan mewujudkan kebutuhan dari rakyat serta untuk kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh negara di dunia. Dalam menjalankan kerjasama internasional, setiap negara berlandaskan pada politik luar negeri yang dimiliki oleh masing-masing negara. Ruang lingkup kerjasama internasional sangatlah luas, yang secara umum meliputi kerjasama internasional di bidang ekonomi, budaya, sosial, keamanan, pertahanan, budaya dan politik.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dewasa ini dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian internasional. Berdasarkan pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 terkait hukum perjanjian, disebutkan pengertian dari perjanjian internasional adalah sebuah persetujuan yang dilakukan oleh subjek internasional negara, yang berbentuk tertulis dan diatur berdasarkan hukum internasional, dan terdiri dari satu maupun lebih instrumen dengan nama apapun. Selain perjanjian internasional, istilah lainnya yang populer digunakan untuk menyebut nama suatu perjanjian internasional adalah konvensi.

Didalam suatu kerjasama internasional yang dilakukan tentu terdapat kepentingan-kepentingan yang dikedepankan oleh negara-negara yang tidak dapat dilakukan ataupun dipenuhi pada ruang lingkup

nasionalnya sendiri, hal ini serupa seperti yang dinyatakan oleh Yani dan Perwita, yaitu :⁵⁴

“Kerjasama internasional merupakan sisi lain daripada permasalahan internasional yang merupakan bagian dari salah faktor didalam hubungan internasional. Masalah terpenting dari kerjasama internasional itu didasari pada seberapa besar keuntungan bersama yang akan didapat melalui kerjasama internasional tersebut bisa mendorong konsepsi daripada kepentingan tindakan secara kompetitif dan unilateral. Kerjasama internasional dibentuk oleh kehidupan internasional yang mencakup berbagai segi kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, ideologi, lingkungan hidup dan pertahanan.”

Terkait kekuatan mengikat atas hukum internasional terhadap negara sangat tergantung pada kesepatan (*consent*) daripada negara-negara yang melakukan kerjasama untuk menerima segala aturan dan prinsip yang terdapat didalamnya.

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional

Bentuk-Bentuk kerjasama internasional dapat dibedakan dari perjanjian internasional yang dibuat sebagai landasan hukum hubungan kerjasama internasional tersebut. Secara umum, Bentuk-Bentuk kerjasama internasional dapat dibedakan menjadi: kerjasama internasional bersifat bilateral, kerjasama internasional bersifat regional, dan kerjasama internasional bersifat multilateral.

a. Kerjasama Internasional Bilateral

---

⁵⁴ Yani dan Perwita, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005).

Kerjasama internasional bilateral merupakan hubungan yang dilakukan dengan negara-negara atau pihak peserta kerjasama terikat didalam satu perjanjian internasional tertentu. Salah satu contoh kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia adalah sebuah kerjasama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* bersama dengan Australia terkait dengan bantuan hukum timbal balik dalam permasalahan pidana.

b. Kerjasama Internasional Multilateral

Berbeda halnya dengan kerjasama internasional bilateral dimana para pihak atau negara yang melakukan kerjasama hanya terdiri dari dua negara saja, kerjasama internasional dilakukan melalui suatu perjanjian internasional yang terdiri dari lebih dari dua negara atau pihak peserta.⁵⁵ Indonesia sendiri selama ini ikut berperan didalam banyak perumusan kerjasama internasional yang bersifat multilateral, salah satunya kerjasam internasional yang Indonesia menjadi negara pihak didalamnya adalah *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2005.

c. Kerjasama Internasional Regional

Selain kedua bentuk kerjasama diatas, terdapat bentuk kerjasama internasional lainnya, yaitu kerjasama internasional yang bersifat regional. Kerjasama ini dilandasi suatu perjanjian internasional bersifat

---

⁵⁵ Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*. Op.cit., 40.

regional yang hanya berlaku terbatas di wilayah kawasan tertentu, dan sekaligus menunjukkan kekhasan daripada wilayah regionalnya. Sebagai contohnya adalah kerjasama regional yang diikuti oleh Indonesia yaitu *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 untuk mewujudkan suatu wadah berdialog dan berkonsultasi terkait hal-hal yang mengenai keamanan dan politik di kawasan asia tenggara. ⁵⁶

3. Asas-Asas Umum Dalam Kerjasama Internasional

Didalam melaksanakan kerjasama internasional, terdapat asas-asas yang diketahui secara umum dan perlu diperhatikan, antara lain :

a. Asas *free consent*

Asas *free consent* adalah asas yang telah mengalami perkembangan dari asas kebebasan untuk berkontrak. Menurut prinsip ini, segala proses perundingan suatu perjanjian internasional haruslah disepakati dengan berdasarkan kebebasan oleh para pihak untuk menyampaikan kehendaknya. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang tidak didasari oleh asas *voluntary*, ataupun jika perjanjian tersebut didasari oleh suatu tekanan tertentu, maka akan memunculkan akibat hukum, seperti misalnya batal (*void*) maupun perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

---

⁵⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Forum Regional ASEAN (ARF)," 2019 <https://kemlu.go.id/portal/i/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-asean-arf> [diakses 1 Februari 2021].

b. Asas *good faith*

Asas *good faith* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan asas itikad baik adalah suatu asas yang sudah seharusnya menjadi perhatian ketika langkah-langkah pendekatan informal antar para calon negara pihak yang melakukan suatu perjanjian. Langkah-langkah pendekatan ini selanjutnya berkembang menjadi pendekatan secara formal, mulai dari langkah perundingan, penerimaan, pengotentikan, mengikatkan diri, pemberlakuan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, sampai yang terakhir yaitu berakhirnya perjanjian internasional tersebut. Asas *good faith* dapat dilihat dari segala praktek yang dilakukan oleh para pihak, bahkan dapat dilihat sejak sebelum perjanjian internasional yang dibuat tersebut mulai diberlakukan.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Dalam artian luas, *pacta sunt servanda* dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang memiliki sifat mengikat kepada negara peserta dari sebuah perjanjian internasional yang telah disetujui. Pada saat suatu negara menyatakan diri untuk menjadi negara pihak dari sebuah perjanjian internasional, pernyataan atas kehendak diri dari negara tersebut untuk terikat kepada ketentuan hukum internasional yang diatur didalam perjanjian tersebut. Hal ini juga berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian tersebut akan berlaku juga didalam ruang lingkup nasional dari negara yang menyatakan kehendaknya.

Asas *pacta sunt servanda* adalah satu dari sebagian norma dasar dari hukum perjanjian, sekaligus memiliki kaitan yang erat terhadap asas itikad baik untuk mematuhi dan menghormati segala ketentuan yang berlaku dalam suatu perjanjian. *Hugo de Groot* menyebutkan bahwa diantara beberapa asas hukum alam yang mendasari sistem hukum internasional, *pacta sunt servanda* adalah asas yang paling fundamental. Asas ini merupakan bagian daripada hukum kodrat yang telah menjadi dasar dari kesepakatan bersama (konsensus).⁵⁷

4. Tahapan Pembentukan kerjasama Internasional

Menurut konvensi Wina 1968, secara umum tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan 3 tahapan, yaitu : tahapan perundingan, tahapan penandatanganan dan tahapan pengesahan. Namun secara lebih teknis perjanjian internasional dilakukan dengan melewati proses penyusunan naskah perjanjian, penerimaan dan juga pengesahan bunyi naskah.

a. Tahapan Penjajakan atau Perundingan (*Negotiation*)

Tahapan penjajakan adalah langkah pertama yang dilakukan oleh para pihak dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Hal ini dilakukan untuk membicarakan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang hadir diantara para pihak dan menimbulkan kehendak

---

⁵⁷ Danel Aditia Situngkir, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.2 (2018), 156 <<https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>>.

daripada negara-negara tersebut untuk mengadakan perundingan yang melahirkan perjanjian internasional.

Setelah adanya kesepakatan untuk melakukan perundingan maka tiap-tiap negara menunjuk organ yang memiliki kompetensi untuk hadir dalam suatu perundingan. Dalam konvensi Wina 1969 dan konstitusi suatu negara, yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan perundingan adalah kepala negara, meskipun pada prakteknya, kepala negara jarang sekali untuk ikut dalam perundingan melainkan mengirim perwakilan untuk menghadiri perundingan tersebut seperti, Menteri Luar Negeri, ataupun wakil diplomatiknya dan jika tidak maka oleh karena hal tersebut ditunjuklah wakil-wakil yang berkuasa penuh untuk atas dasar menerima surat kuasa penuh (*full power*) untuk dapat melakukan perundingan, melakukan penandatanganan atau menyatakan persetujuan atas teks perjanjian dalam suatu konperensi (pasal 7 ayat 1 dan 2 konvensi wina 1969).

Dalam hal suatu “perjanjian internasional bilateral” perundingan dikenal dengan sebutan “*talk*”, berbeda halnya dengan “perjanjian multilateral” yang lebih dikenal dengan nama “ *diplomatic conference* ” (konperensi diplomat).

b. Tahapan Penandatanganan (*Signature*)

Tahapan berikutnya dalam pembentukan perjanjian internasional adalah penandatanganan atas perjanjian internasional,

seperti yang disebut dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penandatanganan merupakan suatu bentuk persetujuan terhadap naskah perjanjian internasional yang sudah dihasilkan dan/atau suatu pernyataan untuk mengikatkan diri oleh suatu negara secara definitif yang didasari oleh kesepakatan para pihak dalam perjanjian.⁵⁸

Pada praktek diplomatik, penandatanganan memiliki fungsi untuk menyatakan persetujuan terhadap teks perjanjian dan belum bersifat mengikat terhadap perjanjian tersebut bagi negara-negara yang melakukan penandatanganan. Bisa dikatakan bahwa, apabila suatu negara telah melakukan penandatanganan terhadap suatu perjanjian namun belum meratifikasi perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut secara yuridis belum dapat dikatakan sebagai negara peserta dalam suatu perjanjian.

c. Tahapan Pengesahan (*Ratification*)

Mengenai pengertian “ratifikasi”, dijelaskan oleh Edy Suryono bahwa ratifikasi memiliki akar kata dari bahasa latin “ratificare” yang artinya adalah “persetujuan” (*approval*) ataupun “ pengesahan” (*confirmation*). Sedangkan menurut J.G Starke menyebutkan bahwa secara teoritis ratifikasi merupakan suatu persetujuan yang dilakukan

---

⁵⁸ Rosmi Hasibuan, *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020)
<<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1610>>.

oleh kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara penandatanganan perjanjian internasional yang dimuat dalam traktat tersebut oleh wakil-wakil yang memiliki kuasa penuh yang sudah diangkat sebagaimana seharusnya.

Selanjutnya, dalam pasal 1(b) konvensi Wina 1969, pengertian secara resmi dari ratifikasi disebutkan, bahwa:

“ratification”, acceptance, approval, and accession, imply in every case the global act so named wherein a state establishes at the worldwide plane its consent to be certain through a treaty”.

Sementara itu, didalam pasal 2 konvensi Wina, ratifikasi diartikan sebagai suatu tindakan internasional melalui langkah mana suatu negara menyetujui di tingkat internasional untuk terikat didalam suatu traktat atau perjanjian internasional.

C. Tinjauan Umum Tentang *Asset Recovery* Hasil Tindak Pidana Dalam UNCAC 2003

UNCAC 2003 saat ini menjadi salah satu landasan hukum internasional utama yang digunakan dalam melakukan pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Oleh karena hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai hal-hal yang diatur dan terdapat didalam UNCAC 2003 sebagaimana hal berikut.

1. Gambaran Umum UNCAC

United nations convention against corruption (UNCAC) saat ini merupakan satu-satunya instrumen internasional anti korupsi yang bersifat mengikat secara hukum.⁵⁹ Konvensi UNCAC 2003 lahir atas dasar keprihatinan dunia atas tindakan korupsi yang dianggap memiliki dampak yang luar biasa buruk dan merugikan dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dari kacamata ekonomi, korupsi mengakibatkan terjadinya pemborosan dalam menggunakan sumber daya alam, menghambat pertumbuhan ekonomi dan membatasi investasi asing, meningkatkan belanja negara, menjadikan sistem perpajakan yang tidak efisien, dan lainnya. Dalam hal sosial politik, korupsi memberikan dampak atas melemahnya demokrasi dan aturan hukum, membuat asas-asas pemerintahan secara baik serta administrasi publik yang telah efektif menjadi berbahaya, menghancurkan pasar, merusak tatanan institusi yang memberikan jaminan keamanan, stabilitas dan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan ancaman terhadap hak asasi manusia.

UNCAC lahir sebagai pelengkap dan memberikan pengaturan terkait jenis-jenis korupsi yang tidak tercakup pada instrumen-instrumen internasional lainnya, seperti misalnya penyalahgunaan wewenang secara umum dan *recovery assets*. UNCAC diadopsi oleh sidang umum PBB dengan berdasarkan resolusi 58/4 pada tanggal 13 Oktober 2003 dan mulai

---

⁵⁹ UNODC, "United Nations Office on Drugs and Crime United Nations Convention against Corruption," *UNITED, NATIONS* <<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>> [diakses 8 Februari 2021].

diberlakukan pada bulan Desember 2005 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 68 (1) UNCAC.

Pada tingkatan global, UNCAC 2003 menjadi *the first legally binding global anti corruption agreement*, yang mengedepankan prinsip persamaan hak, kesamaan kedaulatan, integritas teritorial dan juga prinsip non-intervensi. UNCAC 2003 mengikat semua negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini dan dalam hal penerapannya akan memberikan dampak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara terkait tindak pidana korupsi. Pada pasal 3 UNCAC 2003 disebutkan bahwa ruang lingkup daripada konferensi ini antara lain berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan dan juga penuntutan tindak pidana korupsi, pengembalian dan perampasan aset hasil kejahatan yang diatur menurut konvensi ini. Secara keseluruhan, didalam konvensi UNCAC mengatur 5 (lima) hal utama, terdiri dari : 1) tindakan pencegahan, 2) penegakan hukum dan kriminalisasi, 3) kerjasama internasional. 4) pertukaran informasi bantuan teknis, 5) dan pengembalian aset (*asset recovery*).⁶⁰

2. Pengertian korupsi

Berbeda halnya dengan kebanyakan konvensi ataupun peraturan perundang-undangan yang memasukkan pengertian dari objek yang diatur

---

⁶⁰ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, 1 (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013).

dalam peraturan tersebut, UNCAC tidak memberikan definisi yang khusus terkait apa yang dimaksud dengan korupsi. Namun, UNCAC mengategorikan tindakan-tindakan apa saja yang dapat disebut sebagai korupsi dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum yaitu :

- 1) *Bribery of national public officials* (penyuapan pejabat publik nasional)
- 2) *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* (penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik)
- 3) *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* (penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik)
- 4) *Trading in influence* (pemanfaatan pengaruh)
- 5) *Abuse of functions* (penyalahgunaan fungsi)
- 6) *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah)
- 7) *Bribery in the private sector* (penyuapan di sektor swasta)
- 8) *Embezzlement of property in the private sector* (penggelapan kekayaan di sektor swasta)
- 9) *Laundering of proceeds of crime* (pencucian hasil kekayaan)
- 10) *Concealment* (penyembunyian)
- 11) *Obstruction of justice* (penghalangan peradilan)

Dalam ruang lingkup hukum nasional Indonesia, Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (UU PTP Korupsi) yang telah telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Pada pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTP Korupsi memberikan rumusan tentang tindak pidana korupsi, yaitu :⁶¹ “Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain maupun suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian dari perekonomian maupun keuangan dari negara”.

Selanjutnya, dalam pasal 3 UU No. 32 Tahun 1999 tentang PTP Korupsi memberikan rumusan tindak pidana korupsi sebagai berikut :⁶²

“Setiap orang yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain maupun suatu korporasi, dengan menggunakan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang dimilikinya karena kedudukan atau jabatan secara salah, yang menimbulkan kerugian terhadap perekonomian ataupun keuangan negara”.

Pengertian korupsi dalam undang-undang ini dijabarkan secara jelas dalam 13 butir pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dapat diuraikan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Dari ketiga puluh bentuk korupsi tersebut pada dasarnya dapat digolongkan kedalam 7 (tujuh) kelompok sebagai berikut :⁶³

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Penyuapan

---

⁶¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶² Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶³ M. Syamsa Ardismita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel,” *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, 2014, 4.

- 3) Pemerasan
- 4) Penggelapan dalam jabatan
- 5) Kecurangan
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
- 7) Gratifikasi.

Dapat dilihat dari dua aturan hukum diatas bahwa UU PTP Korupsi di Indonesia belum mencakup semua tindakan yang sudah dikategorikan sebagai tindakan korupsi di dalam UNCAC.

3. Pengertian Aset

Aset merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris “*asset*” yang memiliki arti sebagai sebuah kontrak keuangan atau benda fisik yang bernilai dan dimiliki oleh individu, penguasa, ataupun perusahaan, yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai tambah bagi pemiliknya atau memberikan likuiditas.⁶⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Aset adalah sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar, kekayaan ataupun modal.

Pengertian aset lainnya terdapat dalam pasal 1 rancangan undang-undang perampasan aset yang menyebut bahwa aset merupakan benda yang terdiri dari benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Pada

---

⁶⁴ Black’s Law Dictionary, “Definition of Asset,” 2013, hal. 0–2 <<http://thelawdictionary.org/skills-transfer/>> [diakses 11 Maret 2021].

UNCAC 2003 kita tidak akan menemukan diksi “*asset*” didalamnya karena UNCAC 2003 menggunakan diksi “*property*” yang mempunyai makna serupa dengan “*asset*”.

Disebutkan bahwa “*property*” merupakan segala bentuk aset, baik yang tumbuh dan tidak tumbuh, aset bergerak dan tidak bergerak, aset berwujud dan tidak berwujud, serta dokumen maupun instrumen hukum lainnya yang dapat dijadikan bukti terhadap suatu hak atas maupun kepentingan didalam suatu aset tertentu.

4. Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana

Definisi aset hasil tindak pidana terdapat pada pasal 1 ayat 2 rancangan undang-undang perampasan aset yang menyebut bahwa aset tindak pidana merupakan aset yang didapat atau diduga bersumber dari suatu tindak pidana, ataupun kekayaan lainnya yang didapat secara tidak wajar akan dianggap merupakan bagian dari aset tindak pidana. sedangkan jika kita merujuk pada ketentuan didalam UNCAC 2003, aset hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* merupakan segala aset kekayaan yang dipeloeh ataupun berasal, secara langsung maupun tidak langsung dari suatu pelaksanaan tindak pidana.

Dari pengertian aset dan aset hasil kejahatan dari kedua aturan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa aset hasil tindak pidana adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu yang cara perolehanya didapat atau diduga berasal dari suatu tindak pidana tertentu.

5. Pengertian *Asset Recovery*

Asset recovery dalam tindak pidana korupsi saat ini sudah menjadi suatu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi. Menurut Purwaning M. Yanuar, *asset recovery* dapat diartikan sebagai berikut :

“Suatu sistem penegakan hukum yang dilaksanakan oleh negara yang menjadi korban daripada tindak pidana korupsi untuk merampas dan menghilangkan hak yang dimiliki atas aset dari hasil tindak pidana korupsi dari para pelaku tindak pidana korupsi dengan melewati serangkaian proses dan mekanisme, baik dilakukan secara perdata maupun pidana, aset dari hasil tindak pidana korupsi, yang berada di luar maupun dalam negeri, dilakukan pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, dan selanjutnya dikembalikan kepada negara asal tindak pidana korupsi, dengan demikian dapat mengembalikan keuangan negara yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi sekaligus melakukan pencegahan bagi pelaku untuk menggunakan aset tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan lainya serta menjadikan efek jera kepada para pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi”.

Di negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, dalam melakukan pengejaran atas aset hasil tindak pidana korupsi tidak memberikan pandangan yang memisahkan sistem hukum pidana dan perdata. Pada negara-negara tersebut terdapat proses *asset recovery* yang dikenal dengan istilah *asset seizure* ataupun *asset forfeiture*. *Asset Seizure* tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat merampas aset hasil tindak pidana tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun, hal tersebut berlainan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *civil*

law, asset forfeiture ini hanya dikenal didalam proses sistem hukum pidana, atau yang lebih awam disebut dengan istilah penyitaan ataupun pengembalian setelah adanya putusan pengadilan yang berkedudukan hukum tetap.⁶⁵

Pada mulanya *asset recovery* dikenal dengan nama *investment recovery* yang merupakan suatu rangkaian proses untuk memanfaatkan sesuatu aset yang awalnya tidak berguna menjadi bernilai (*divestment*). *Asset recovery* mulai banyak diterapkan setelah pada akhir tahun 1980-an dimana kejahatan lintas batas mulai berkembang dan menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Amerika Serikat menggunakan perampasan aset pada kejahatan narkoba dengan *asset forfeiture*-nya, selain itu, Belanda juga mengimplementasikan pemulihan aset hasil kejahatan kedalam sistem hukum nasionalnya. Pada awal tahun 2000-an ketika ditandatanganinya *United Nation Convention on Anti-Corruption* pada 18 Desember 2003 barulah *recovery asset* dalam perkara-perkara menyangkut tindak pidana korupsi diperkenalkan.⁶⁶

Asset recovery sebagai salah satu tujuan pembentukan UNCAC diatur tersendiri didalam Bab V UNCAC mengenai *Asset recovery*. Pada pasal 51 UNCAC disebutkan bahwa *asset recovery* adalah prinsip dasar

---

⁶⁵ NFN Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia / Asset Recovery Corruption Perpetrators and the Heirs in the Indonesian Legal System," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6.1 (2017), 150 <<https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.203>>.

⁶⁶ Ridwan Arifin dan Indah Sri Utami Herry Subondo, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," 1, 2016, 118–19 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>>.

yang dimiliki oleh konvensi ini, dan oleh karena hal tersebut, negara pihak dalam konvensi ini memiliki kewajiban untuk dapat saling memberikan bantuan dan kerjasama seluas mungkin untuk langkah tersebut. Bab mengenai *asset recovery* secara umum mengatur, antara lain : pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan, tindakan untuk pengembalian kekayaan secara langsung, mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional untuk perampasan, kerjasama internasional dengan tujuan perampasan, kerjasama khusus, pengembalian dan penyerahan aset, unit intelijen keuangan, serta perjanjian dan pengaturan bilateral dan multilateral.